



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 579 /060/ 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2013-2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 484/060/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memperbaiki Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Pariaman;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Indikator Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen yaitu:

- a. rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. penetapan Kinerja Pemerintah Daerah.
- c. laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pariaman.
- d. evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Pariaman
- e. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan lingkup SKPD.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pariaman Nomor 484/060/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Desember 2017



WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 579 / 060 / 2017

TANGGAL : 28 Desember 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 - 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN		SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Persentase angka melek huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas dapat membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}}$	x100%	BPS Kota Pariaman	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase Angka putus sekolah	$\frac{\text{Jumlah murid putus sekolah}}{\text{Jumlah seluruh murid}}$	x100%	BPS Kota Pariaman	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh tenaga pendidik dan kependidikan}}$	x100%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan	Jumlah sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rata-rata lama sekolah	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang menyelesaikan/sedang mengikuti pendidikan formal}}{\text{Jumlah pendidikan berusia 15 tahun keatas}}$	X 100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ SDLB/ Paket A	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ SDLB/ Paket A	$\frac{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12}} \times 100$		
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ MTs/ Paket B	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SLTP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100\%$		
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ MTs/ Paket B	$\frac{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 yang sekolah di SLTP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100\%$		
		Jumlah kunjungan siswa ke perpustakaan		Bagian Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretariat Daerah
		Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti pelatihan		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah armada yang berkualitas dan memadai		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		2.	Pengembangan pendidikan formal dan non formal	Jumlah sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal	Jumlah sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
3.	Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan	Persentase pemanfaatan TIK dalam tata pemerintahan		Diskominfo	Diskominfo
		Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina			
		Jumlah informasi yang disampaikan melalui media massa	$\frac{\text{Jumlah informasi yang keluar di media massa}}{\text{Jumlah seluruh informasi yang disampaikan ke media massa}} \times 100 \%$		
4.	Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	Persentase tingkat pemahaman keagamaan dimasyarakat		Bag. Kesra	Sekretariat Daerah
		Persentase keikutsertaan siswa terhadap kegiatan keagamaan			
5.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya	Jumlah Lembaga Pemuka Adat yang difasilitasi		DPMD	DPMD
		Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu		SATPOL PP dan Damkar	SATPOL PP dan Damkar
6.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup (AHH) per tahun	$\frac{\text{Jumlah usia kematian penduduk}}{\text{Jumlah semua penduduk yang meninggal dunia}}$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Jumlah Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi saat lahir}}{\text{Jumlah seluruh bayi yang lahir}} \times 1000$		

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
		pertahun			
		Jumlah Angka Kematian Ibu per 1.000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu saat melahirkan}}{\text{Jumlah seluruh kelahiran hidup}} \times 1000$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan Antenatal Minimal 4 kali (K4)	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil}} \times 100 \%$		
		Persentase Balita Bergizi Buruk pertahun	$\frac{\text{Jumlah balita bergizi buruk}}{\text{Jumlah seluruh balita}} \times 100 \%$		
		Rasio Posyandu per satuan Balita pertahun	$\frac{\text{Jumlah posyandu}}{\text{Jumlah seluruh balita}} \times 100 \%$		
		Jumlah penduduk miskin yang tercover pembiayaan kesehatan (JKSS) per tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin yang tercover pembiayaan miskin}}{\text{Jumlah penduduk miskin}} \times 100 \%$		
		Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi}}{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 11 bulan}} \times 100 \%$		
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pariaman	Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru positif (Succes Rate) minimal 85%	$\frac{\text{Jumlah pasien TB paru positif yang sembuh}}{\text{Jumlah pasien TB paru positif yang diobati}} \times 100 \%$		

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Puskesmas dengan Indence Rate (IR) DBD <49 per 1.000 penduduk			
8.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit layanan terpadu}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100 \%$	DP3AKB	DP3AKB
		Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100 \%$		
9.	Meningkatnya Produktifitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Persentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah seluruh kontibusi sektor pertanian}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100 \%$	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase penambahan produksi padi per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi padi tahun berjalan kurang jumlah produksi padi tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah seluruh produksi padi tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$		
		Persentase penambahan populasi ternak pertahun	$\frac{\text{Jumlah seluruh populasi ternak (sapi, kambing, ayam pedaging) tahun berjalan kurang jumlah populasi tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah seluruh populasi ternak tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100 \%$		
		Persentase penambahan produksi hasil ternak			

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Jumlah rata-rata pendapatan petani binaan			
		Jumlah Gerakan Pengendalian Organisme Penyakit tanaman		Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penurunan Jumlah kasus rabies			
		Jumlah kelompok tani yang menggunakan TTG dan Alsintan			
		Jumlah Kerjasama pemasaran hasil produksi ternak			
10.	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan daerah	Persentase ketersediaan sumber energi dan protein perkapita		Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase penguatan cadangan pangan			
		Persentase Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan			
11.	Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian	Jumlah jenis produk olahan hasil pertanian			
12.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya [(ton/tahun)	$\frac{\text{Jumlah produksi dan produk tiftas perikanan budidaya}}{\text{Jumlah seluruh produksi dan produktiftas perikanan}} \times 100 \%$	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
	budidaya dan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun)	$\frac{\text{Jumlah produksi perikanan tangkap}}{\text{Jumlah seluruh produksi perikanan}} \times 100\%$		
13.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan nelayan dan petani ikan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibina Jumlah unit pengolahan ikan		Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
14.	Meningkatnya pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah bibit restocking Luas hutan mangrove Luas terumbu karang yang dipelihara			
15.	Meningkatnya jumlah koperasi aktif, mandiri, UMKM, dan usaha ekonomi kreatif dan Profesional	Jumlah koperasi Jumlah UMKM	Koperasi adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi Jumlah seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Disperindagkop & UKM	Disperindagkop & UKM
16.	Tersedianya Pasar yang Representatif dan Nyaman	Jumlah Kawasan Pasar yang dibangun dan ditata	Jumlah Kawasan Pasar yang dibangun, direhabilitasi/renovasi, ditata dan dikelola oleh Dinas Perindagkop dan UKM		
17.	Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku	Jumlah alat ukur yang ditera ulang Jumlah penurunan temuan barang yang tidak memenuhi standar			

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
18.	Meningkatnya Sektor Industri dan Industri Kreatif dan komoditi unggulan	Persentase pertumbuhan industri	$\frac{\text{Jumlah Industri pada Tahun n} - \text{Jumlah Industri pada Tahun penetapan target}}{\text{Jumlah Industri pada tahun penetapan target}} \times 100 \%$		
		Jumlah industri kreatif		Disperindagkop & UKM	Disperindagkop & UKM
		Jumlah teknologi tepat guna yang diciptakan		DPMD	DPMD
19.	Meningkatnya pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata	Jumlah kawasan wisata yang dibangun, dikembangkan dan ditata		Disparbud	Disparbud
20.	Meningkatnya Promosi wisata secara konsisten, baik dalam lingkup Regional, Nasional dan Internasional	Jumlah team jaringan kerjasama promosi pariwisata			
		Jumlah ivent promosi yang dilaksanakan			
		Jumlah buku statistik wisata terpadu yang disusun			
		Jumlah Bahan Promosi Wisata yang dibuat			
		Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina			
21.	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan, dibina dan dilestarikan			

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya		Disparbud	Disparbud
22.	Meningkatnya jumlah penanaman modal	Jumlah Investor yang menanamkan modal		DPMPTSP & Naker	DPMPTSP & Naker
		Jumlah perizinan yang di terbitkan		DPMPTSP & Naker	DPMPTSP & Naker
23.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	Persentase tingkat disiplin aparatur	$\frac{\text{Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin}}{\text{Jumlah seluruh PNS yang ada}} \times 100 \%$	BKPSDM	BKPSDM
		Persentase ketersediaan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintah daerah		BAPPEDA	BAPPEDA
24.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah	Tingkat penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah		BKD	BKD
25.	Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintahan berbasis web dan secara online (e-Government)	Persentase peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan		BAPPEDA	BAPPEDA
		Jumlah informasi dan data yang jelas, akurat, mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan terutama dalam perencanaan pembangunan			

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
26.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan		Disdukcapil	Disdukcapil
		Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik			
		Persentase yang memilik KK		Disdukcapil	Disdukcapil
		Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran			
		Jumlah dokumen profil kependudukan yang diterbitkan			
		Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang dilayani			
27.	Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah	Tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target PAD	$\frac{\text{Realisaasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$	BKD	BKD
		Persentase tingkat kenaikan PAD			
28.	Terwujudnya peñatausahaan keuangan dan pengelolaan asset	Persentase asset yang terdata		Bag. Asset	SETDA
		Nilai dan Predikat Akuntabilitas Kinerja		Bag. Organisasi	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
	daerah yang akurat dan akuntabel	Pemerintah		dan Aparatur	SETDA
		Nilai dan peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Bag. Pemerintahan	SETDA
29.	Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang asiratif, aplikatif dan akuntabel	Persentase tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang		BAPPEDA	BAPPEDA
		Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan			
		Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas			
30.	Menurunnya angka pengangguran	Persentase penurunan jumlah pengangguran		DPMPTSP dan Naker	DPMPTSP dan Naker
		Jumlah tenaga kerja yang berkualitas			
31.	Mengurangi tingkat kemiskinan	Persentase keterpaduan program dalam penanggulangan kemiskinan		BAPPEDA	BAPPEDA
		Persentase menurunnya angka kemiskinan			
		Jumlah KK miskin yang terlayani		Dinas Sosial	Dinas Sosial

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Jumlah KK Miskin yang diberdayakan di Desa Prioritas			
		Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang terlayani			
		Persentase dan KK miskin dan kelompok rentan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar		Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang menerima bantuan stimulan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin			
32.	Meningkatnya kualitas lingkungan untuk	Persentase sampah Kota Pariaman yang terkelola dengan baik	$\frac{\text{Jumlah sampah yang ditangani (m}^3\text{)}}{\text{Volume produksi sampah (m}^3\text{)}} \times 100 \%$	DLH	DLH

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
	menciptakan pembangunan yang berkelanjutan	Persentase pemantauan kualitas lingkungan (tanah, udara dan air)	$\frac{\text{Jumlah titik pemantauan kualitas tanah, udara dan air yang sesuai baku mutu}}{\text{Jumlah titik pemantauan kualitas tanah, udara dan air yang dilakukan}} \times 100 \%$		
		Jumlah Ruang Terbuka Hijau			
33.	Meningkatnya kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana		BPBD, DINAS SOSIAL	BPBD DINAS SOSIAL
		Jumlah kasus kebakaran yang tertanggulangi	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan penanggulangan kebakaran}}{\text{Target pelaksanaan penanggulangan kebakaran}} \times 100 \%$	SATPOL PP & DAMKAR	SATPOL PP & DAMKAR
34.	Meningkatnya kapasitas infrastruktur pemukiman dan perkotaan berbasis tataruang untuk menunjang aktivitas masyarakat	Jumlah infrastruktur pendukung sebagai penunjang aktifitas masyarakat		PUPR dan Dinas Perumra, Kawasan Pemukiman & Pertanahan	PUPR dan Dinas Perumra, Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase cakupan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat			
		Persentase pengurangan luas genangan air yang tertangani	$\frac{\text{Luas Daerah masih tergenang}}{\text{Luas Daerah Rawan Genangan}} \times 100\%$	DINAS PUPR	DINAS PUPR

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat	Jumlah ketersediaan air irigasi (lt/det pada setiap musim tanam) X100% Jumlah kebutuhan air irigasi (lt/det)		
35.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi dan informatika dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana transportasi darat yang berfungsi secara optimal Jumlah penambahan sarana pendukung keselamatan jalan raya		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

WALIKOTA PARIAMAN



MUKHLIS R